

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Zakat tidak hanya sekedar sebagai kewajiban, akan tetapi zakat juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan syari'at islam dan dapat didistribusikan kepada orang yang berhak merima secara merata. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. At-Taubah ayat: 103)

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Dikatakan demikian, karena berdasarkan penunjukan kata tersebut dalam fiil amr, sementara menurut kaidah ushul fiqh asal suatu perintah menunjukkan pada

kewajiban. Dengan demikian, berarti mengumpulkan zakat dari para muzakki wajib dilaksanakan.<sup>1</sup>

Maka peran organisasi pengelola zakat sangat penting untuk meningkatkan manfaat zakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>2</sup>

Di samping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya. Mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten/Kota sampai kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasan, *MANAJEMEN ZAKAT (Model Pengelolaan yang Efektif)*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h.7

<sup>2</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 11

yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infak, sadaqah, & wakaf.<sup>3</sup>

Kedua lembaga yang diakui oleh pemerintah tersebut sama-sama memiliki tugas untuk mengelola zakat yang berasal dari para *muzakki* sehingga dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahiq*. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai amil zakat memang bukanlah hal yang mudah, apalagi dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang beragam. Sehingga pengelolaan diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua kegiatan pengelolaan harus terencana, terorganisir dan juga terkontrol agar dapat dievaluasi tingkat pencapaiannya.

Dalam pengelolaannya zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain. Pengelolaan harus berlandaskan Al Quran dan As Sunnah, keterbukaan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka, menggunakan manajemen dan administrasi modern, badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, BAZ dan LAZ bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam,

---

<sup>3</sup> Moch Arif, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat*, 2009, <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=63>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2014

<sup>4</sup> Moch Arif, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat*, 2009, <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=63> diakses pada tanggal 12 Oktober 2014

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>5</sup> Maka dari itu diperlukan manajemen pengelolaan zakat agar tujuan dari zakat tersebut dapat tercapai. Namun hal ini bisa tercapai jika sistem pengendalian intern dalam Organisasi Pengelola Zakat tersebut juga sudah efektif. Dengan kata lain optimalisasi zakat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem pengendalian intern yang efektif.

Pengendalian internal dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui pengendalian internal ini dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Pengendalian internal sangat strategis dalam pelaksanaannya, karena pengendalian internal ini memberikan keandalan atau jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, pengamanan terhadap asset, serta ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Maka dengan adanya pengendalian ini dapat membantu mencapai tujuan dari organisasi tersebut dengan pendekatan sistematis, disiplin untuk

---

<sup>5</sup> Zuhri, *Zakat...*, h.12

<sup>6</sup> Lilis Puspitawati, Sri Dewi Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 213

mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi dengan proses yang jujur, bersih, dan baik.<sup>7</sup> Sehingga pengendalian internal menjadi kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja.

Adanya pengendalian internal ini dapat memberikan jaminan adanya kepastian dalam organisasi di BAZNAS Kabupaten Temanggung, khususnya dalam masalah pengelolaan zakat, sehingga memperkecil peluang terjadinya pelanggaran. Hal tersebut sangatlah masuk akal, karena di dalam tubuh BAZ terdapat sebuah komisi yang akan mengawasi sepak terjang lembaganya dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan dalam BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Kemudian realitas yang ada dimana BAZNAS Kabupaten Temanggung merupakan bentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Temanggung dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Temanggung juga dapat mewujudkan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

---

<sup>7</sup> Akmal, *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit*, Jakarta: PT. Indeks Jakarta, 2009, h. 12

Seiring berjalannya waktu BAZNAS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, dalam hal pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Hal ini dibuktikan semenjak dikeluarkan surat edaran bupati SE No: 451/03763/2012 bahwa PNS muslim diwajibkan membayar zakat 1% dari gaji. Sehingga mulai dari tahun 2012 BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 497.500.000,- kemudian pada tahun 2013 dapat menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan pada tahun 2014 dapat menyalurkan dana hingga mencapai Rp. 2.000.000.000,-. Dari peningkatan penyaluran dana tersebut, BAZ sebagai pengelola zakat memerlukan pengendalian yang dapat memberikan keyakinan untuk tercapainya tujuan dari pengelolaan zakat.

Atas dasar latar belakang inilah, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pengendalian internal pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung?

2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengetahui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung.
2. Mengetahui sistem pengendalian internal pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini memiliki manfaat untuk dapat meramaikan kekhazanahan ilmu dalam bidang ekonomi islam dengan menyajikan kejelasan tentang pengendalian internal dalam pengelolaan zakat. Disamping itu, penelitian ini ikut berkontribusi secara akademis dalam pengembangan studi manajemen ZIS dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat. Secara lebih luas penelitian ini disamping memiliki manfaat akademis juga memiliki manfaat praktis bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Rif'an Fadli (2009) UIN Malang, dalam penelitiannya yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Denpasar",

menyatakan bahwa secara historis terbentuknya BAZDA Kota Denpasar atas *inisiatif* penyelenggara badan zakat di Kantor Departemen Agama Kota Denpasar dan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang mana dengan berdirinya BAZDA Kota Denpasar ini diharapkan bisa membantu fakir miskin, yatim piatu atau yang termasuk dalam delapan asnaf tersebut. Manajemen pengelolaan zakat di BAZDA Kota Denpasar, terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan atau pengarahan) dan *controlling* (pengawasan). Dalam pelaksanaan programnya sudah berjalan cukup baik walaupun demikian ada kendala-kendala yang dihadapinya, diantaranya kurangnya kerjasama internal kepengurusan di lembaga pengelolaan zakat yakni di BAZDA Kota Denpasar dan sulitnya lembaga tersebut dalam menentukan *muzakki* (hal ini dikarenakan para muzakki berpindah-pindah dalam penyaluran zakatnya).<sup>8</sup>

Wirdwisyana Wieratman dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*” Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dengan metode deskriptif, Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer digunakan berasal dari wawancara dengan pegawai Rumah Zakat dan Kuesioner kepada Mustahik Rumah Zakat. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari studi pustaka, Laporan Tahunan Rumah Zakat,

---

<sup>8</sup> Rif'an Fadli, “Manajemen Pegelolaan Zakat di BAZDA kota Denpasar”, Skripsi Fakultas Ekonomi (UIN Malang), 2010

serta website resmi Rumah Zakat. Hasil dari penelitian ini, menemukan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan Rumah Zakat sudah berjalan secara efektif, yang ditunjukkan dengan Mustahik Rumah Zakat yang merasa bahwa hidupnya lebih sejahtera dengan bantuan dari Rumah Zakat, dan berdasarkan pengamatan mengenai kehidupan Mustahik Rumah Zakat di daerah penyebaran zakat.<sup>9</sup>

Sri Fadilah dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia)*”. Penelitian ini bersifat penjelasan (*explanatory research*) yang mengacu pada teori atau hipotesis yang akan diuji sebagai penyebab terjadinya suatu fenomena dengan teknik pengumpulan data yaitu kuisioner, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan implementasi pengendalian intern dan implementasi *total quality management* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Artinya, jika implementasi pengendalian intern dan implementasi *total quality management* diterapkan secara optimal pada lembaga amil zakat di seluruh Indonesia, maka penerapan *good governance* akan meningkat. Kemudian terdapat pengaruh secara langsung dan tidak langsung dengan implementasi *total quality management* terhadap penerapan *good*

---

<sup>9</sup> Wirdwisyana Wieratman, “Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat”, Skripsi Fakultas Ekonomi (UNDIP Semarang), 2011

*governance*. Juga secara parsial terdapat pengaruh implementasi pengendalian intern terhadap penerapan *good governance*. Artinya, jika implementasi pengendalian intern pada LAZ seluruh Indonesia semakin baik, maka cenderung penerapan *good governance* baik. terdapat pengaruh secara langsung variabel implementasi *total quality management* dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan implementasi pengendalian intern terhadap penerapan *good governance*. Juga secara total terdapat pengaruh total implementasi *total quality management* terhadap penerapan *good governance*. Artinya, jika implementasi *total quality management* pada LAZ seluruh Indonesia semakin baik, maka penerapan *good governance* cenderung membaik.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih terfokus dalam sistem pengendalian internal pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Temanggung.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan

---

<sup>10</sup> Sri Fadilah, "Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia)", Jurnal jurusan akuntansi (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh), 2011

rasional (logika).<sup>11</sup> Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendiskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain.<sup>12</sup> Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Dengan jenis deskriptif kualitatif penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen yang bertujuan agar dapat menghasilkan data tambahan dari orang-orang di sekitar BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu data yang menggambarkan tentang sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakat.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya<sup>13</sup>, yang diperoleh dari pimpinan dan karyawan pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung.

### b. Sumber Sekunder

---

<sup>11</sup> Winarno Surahkamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hal. 139

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12), hal. 12

<sup>13</sup>Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 84

Sumber Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Biasanya data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.<sup>14</sup> Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan pengelolaan zakat.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

#### a. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar dan sebagainya.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan profil BAZNAS Kabupaten Temanggung, sejarah, struktur

---

<sup>14</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 188

organisasi, visi dan misi. Metode ini digunakan peneliti sebagai informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.

b. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden.<sup>16</sup> Metode wawancara ini dilakukan kepada komisi pengawas dan karyawan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Purhantara, *Metode ...*, h. 80

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2012, h. 89

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis.<sup>18</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian dari wawancara dan dokumentasi untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori skripsi yaitu penjelasan mengenai pengertian pengertian zakat, dasar hukum zakat, serta tujuan zakat, pengelolaan zakat. Dan teori sistem pengendalian internal yang berisi tentang pengertian sistem, pengendalian internal, tujuan pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal.

---

<sup>18</sup> Arikunto, *prosedur...*, h. 278

- Bab III. Berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum di BAZNAS Kabupaten Temanggung mulai dari sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, dan program-program lainnya.
- Bab IV. Berisi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung dan sistem pengendalian internal Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung
- Bab V. Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk BAZNAS Kabupaten Temanggung terkait dengan permasalahan serta kata penutup sebagai akhir kata dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan penelitian.